Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Tidak Dipenuhi Nafkahnya Oleh Seorang Ayah Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Oleh :

Sapoan Ali Rosidi¹, Novita Listyaningrum²,
Ni Luh Ariningsih Sari³, Risdiana⁴
Universitas 45 Mataram
Email : novitakece84@gmail.com

Abstract

Research on legal protection for children who are not in the care of their father after divorce aims to determine how children's rights to support after divorce are respected, both in Islamic law and positive law applicable in Indonesia. The research method used is the Normative method. This type of normative legal research is a process of searching for legal provisions, legal principles and legal doctrine in response to the legal information encountered. Based on the research results, even though it was implemented correctly, the implementation of legal protection efforts for children who do not receive support after divorce has not gone according to expectations, so there are still many children who have not received full pension benefits. rights after parents divorce. This can create many new conflicts in the child's life, thereby affecting the child's growth. The results of this research want to know the protection efforts provided by Islamic law and positive law for children's rights to support their children after divorce, especially through preventive and repressive measures to ensure parents do not neglect their duties and obligations in carrying out the marriage. out of their duties. child support rights. If this right is not respected properly and appropriately, the courts and competent judicial authorities may impose sanctions and revoke parental rights for their negligence. If parental rights are revoked, the parents' obligations towards their children remain valid and do not change, so that the parents still have the obligation to carry them out until the child is an adult.

Keywords: Divorce, Legal protection, Child support rights.

Abstrak

Penelitian mengenai Perlindungan hukum terhadap anak yang tidak berada dalam pengasuhan ayahnya setelah perceraian bertujuan untuk menentukan bagaimana hak anak atas nafkah setelah perceraian dihormati, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode Normatif. Penelitian hukum normatif jenis ini merupakan suatu proses pencarian ketentuan hukum, asas hukum, dan doktrin hukum sebagai tanggapan terhadap informasi hukum yang ditemui. Berdasarkan hasil penelitian, meskipun dilaksanakan dengan benar, namun pelaksanaan upaya perlindungan hukum terhadap anak yang tidak mendapat nafkah setelah perceraian belum berjalan sesuai harapan, sehingga masih banyak anak yang belum mendapat tunjangan pensiun secara penuh. hak setelah orang tua bercerai. Hal ini dapat menimbulkan banyak konflik baru dalam kehidupan anak sehingga mempengaruhi pertumbuhan anak. Hasil dari penelitian ini ingin mengetahui

upaya perlindungan yang diberikan oleh hukum Islam maupun hukum positif terhadap hak anak untuk menafkahi anak pasca perceraian, khususnya melalui tindakan preventif dan represif untuk Menegaskan orang tua agar tidak melalaikan tugas dan kewajibannya dalam menjalankan perkawinan. keluar tugas mereka. hak tunjangan anak. Jika hak ini tidak dihormati dengan baik dan sewajarnya, pengadilan dan otoritas peradilan yang berwenang dapat menjatuhkan sanksi dan mencabut hak orang tua atas kelalaian mereka. Apabila hak orang tua dicabut, maka kewajiban orang tua terhadap anaknya tetap berlaku dan tidak berubah, sehingga orang tua tetap mempunyai kewajiban untuk melaksanakannya sampai anak tersebut dewasa.

Kata kunci : Perceraian, Perlindungan hukum, Hak nafkah anak.

Pendahuluan

Tunjangan adalah hak yang berhak diterima oleh seorang anak untuk dapat membeli pakaian, makanan, dan tempat tinggal, walaupun ibu anak tersebut seorang ibu yang memiliki banyak harta. Tanggung jawab ini wajib berlandaskan Al-Qur'an, Sunnah dan ijin para ulama. Jika keduanya sudah dewasa, maka suami bertanggung jawab menyediakannya untuk istri dan anaknya sesuai dengan budaya (adat) masyarakat tempat mereka tinggal.¹

Anak merupakan rizki yang diberikan. Oleh karena itu, anak perlu mendapat perhatian terbaik dari kedua orang tuanya. Suami istri harus selalu sadar akan tanggung jawabnya dalam perannya dalam mendidik dan membimbing anak-anaknya. Menurut Abu Zahra, penghidupan anak tidak dipelajari dengan sendirinya karenatanggung jawab bukan cuma berkaitan dengan anak, cucu, dan sebagainya. (awlad) juga dengan kekerabatan hawash dan Mawarith yang dapat dimanfaatkan dengan berbagai cara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 104 ayat (1) Kompendium Hukum Islam menyatakan bahwa: "Segala tunjangan anak menjadi tanggungan ayah. Apabila sang ayah meninggal dunia, maka tunjangan anak menjadi tanggung jawab orang yang wajib menafkahi ayah atau walinya."² Dalam bidang hukum, Indonesia memiliki dua sistem hokum yakni hukum Islam dan hukum positif. Keduanya berperan penting dalam perlindungan hukum terhadap anak yang ayahnya tidak mengasuhnya setelah perceraian. Hukum Islam memuat ketentuan mengenai kewajiban ayah dalam membesarkan anak-anaknya serta sanksi bagi bapak yang tidak

¹ Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 267

² Pasal 104 ayat (1) Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

menjalankan kewajibannya. Di sisi lain, hukum positif Indonesia juga mengatur tunjangan anak dalam hukum keluarga, seperti UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

UU Perkawinan tidak mengatur sanksi pemaksaan atau tunjangan yang mengikat dalam akta perceraian, yang dapat dilaksanakan melalui produk seni. Karena sanksi yang mengikat secara hukum maka dapat disimpulkan bahwa UU Perkawinan tidak mengatur sanksi pidana atau sanksi administratif yang dapat diterapkan kepada bapak yang tidak mengindahkan ketetapan pengadilan agama.

Anak selalu menjadi isu yang menarik perhatian banyak sektor masyarakat. Terutama tentang statusnya dan cara orang tua memperlakukan anaknya. Negara melalui kebijakan mengenai pengasuhan anak, ayah kandung wajib memenuhi kebutuhan anak kandungnya. bahkan jika pernikahan orang tuanya tidak lagi mengalami kemajuan. Perlindungan hukum terhadap anak yang ayahnya tidak mengasuhnya setelah perceraian merupakan persoalan yang kompleks. Dalam hal ini diperlukan pemahaman menyeluruh tentang hukum Islam dan hukum positif yang berkaitan hak-hak anak dan perlindungannya. Tidak semua ayah memenuhi kewajiban tunjangan anak setelah perceraian. Hal ini dapat menimbulkan berbagai permasalahan bagi anak, seperti membahayakan kebutuhan dasarnya, tidak mempunyai akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta mempengaruhi kesehatan fisik dan kesejahteraannya. Perlindungan hukum perlu ada bagi anak yang tidak dinafkahi ayahnya setelah perceraian.

Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara, karena semua orang setara dihadapan hukum dan pemerintah. Implikasi pasal ini, hukum harus menjamin perlindungan seluruh warga negara, termasuk anak, karena konstitusi jelas menyatakan Indonesia adalah negara hukum. Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti ingin membahas mengenai pengaturan sanksi hukum terkait permasalahan tersebut dari sisi hukum Islam dan hukum positif. Sebab permasalahan ini jelas akan memberikan berdampak untuk anak dalam kehidupan dan perkembangannya baik secara mental maupun fisik berupa pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan mutu pendidikan.

Metode

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normative yaitu suatu proses untuk mencari suatu aturan hukum, doktrin-doktrin hukum bahkan prinsip-prinsip hukum, agar bisa menjadi solusi masalah hukum yang ada.

Hasil dan Pembahasan

Perlindungan hukum bagian dari unsur penting dalam supremasi hukum. Hal ini dinilai penting karena ketika suatu negara terbentuk, maka akan dibentuk pula undang-undang yang mengatur setiap warga negara di negara tersebut. Dalam suatu negara akan terjadi keterkaitan antar warga negaranya, sehingga akan mempunyai hak dan kewajiban terhadap satu sama lain. Dilindungi undang-undang ialah hak setiap warga negara. Perlindungan hukum mencontohkan berjalannya fungsi hukum untuk mencapai tujuan penciptaan hukum, yaitu keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah perlindungan yang senantiasa diberikan kepada subyek hukum menurut ketentuan undang-undang, baik yang bersifat preventif (preventif) maupun yang represif (memaksa), baik secara tulisan maupun lisan untuk menegakkan ketentuan undang-undang. Perlindungan hukum terhadap anak pasca perceraian sangat penting untuk meminimalisir terjadinya hal-hal diluar tanggung. Dalam rangka perkawinan, pemeliharaan dan pengurusan pengeluaran anak perlu dilakukan secara maksimal untuk menunjang tumbuh kembang anak, termasuk kebutuhan jasmani seperti pangan, air, dan kebutuhan rasa aman dan perlindungan serta kebutuhan rohani. seperti perasaan cinta, harga diri (self-harga), spiritualitas, dan kebutuhan untuk mengekspresikan diri secara lisan dan tulisan³.

Perlindungan hukum terhadap anak yang ayahnya tidak mengasuhnya setelah perceraian tentunya sangat penting untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh anak itu sendiri seperti kurangnya kasih sayang, penelantaran terhadap anak, dan kekerasan terhadap anak yang tidak dapat saya jalani seperti orang lain. . anak-anak. . Tentu saja hal ini tidak berbeda dengan anak jalanan yang tidak diasuh oleh orang tuanya. Pengasuhan anak harus dijamin secara optimal oleh kedua orang tuanya. Agar anak dapat berkembang dengan baik, orang tua harus siap mengakomodir kebutuhan fisik anak atau hak untuk membiayai biaya hidup dan

³ Ronald, Seri Psikologi Anak : Peran Orang Tua Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup, Mendidik dan Mengembangkan Moral Anak, (Bandung: CV. Yrama Widya, 2006), 63

kebutuhan yang disayangi oleh orang tua, perlu mandiri. penghargaan (rasa hormat) dan perlunya ekspresi baik tertulis maupun lisan.

Ketika bercerai tidak melepaskan orang tua dari tanggung jawabnya, terutama tugas mengasuh ayah. Kewajiban untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain terus dilakukan secara terus menerus, baik pada saat menikah maupun setelah perceraian. Dalam hukum positif Indonesia, persoalan penghidupan atau pemenuhan kebutuhan keluarga juga diatur dan dinyatakan sebagai kewajiban suami. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34 ayat 1, dan ditegaskan dalam Ikhtisar Hukum Islam. Oleh karena itu, penghidupan mempunyai pengaruh yang besar dalam membangun keluarga yang bahagia, damai dan sejahtera. Jika penghasilannya tidak bertanggung sama sekali atau masih kurang, maka hal ini dapat menimbulkan permasalahan dalam perkawinan dan dapat berujung pada perceraian. Hal inilah yang menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan sehingga sering dijadikan alasan bagi suami atau ayah untuk tidak menafkahi anak. Namun hukum Islam tidak bisa menerima alasan ini. Bagaimanapun juga, ayah tetap wajib menafkahi kebutuhan anak, kecuali jika secara fisik tidak mampu bekerja.

Perceraian mempunyai akibat hukum yang luas, baik hukum keluarga, hukum harta benda, maupun hukum kontrak. Akibat utama dari perceraian adalah setelah perceraian, mantan istri dan mantan suami terpaksa hidup terpisah. Dengan demikian, segala biaya yang berkaitan dengan penitipan anak dan segala kebutuhan anak ditanggung oleh ayah untuk memenuhinya. Sehubungan dengan itu, besaran nominal kebutuhan pengasuhan dan pendidikan anak ditentukan oleh hakim, besaran tersebut juga sesuai dengan kemampuan keuangan ayah dan banyaknya tanggung jawab lain yang dipikulnya. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 memuat hak anak dengan tujuan untuk menjamin perkembangannya secara normal, terutama mental, fisik, dan sosial. perkembangan mereka. kebutuhan dasar anak. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebelumnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 untuk informasi tentang hukum Indonesia yang berkaitan dengan perlindungan anak. Ahmad Kamil mengatakan bahwa orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara bertanggung jawab untuk melindungi anak. Melakukan hal ini termasuk melakukan berbagai upaya terus menerus untuk melindungi hak anak.

Pada saat yang sama, harus ada peningkatan pengawasan terhadap anak. Tujuannya agar hak anak dilindungi dan mencegah masuknya pengaruh negatif dari luar yang dapat

menghambat tumbuh kembang anak⁴. Selama ini implementasi penghormatan hak anak pasca perceraian belum menerapkan peraturan yang melindungi hak anak. Hal ini dikarenakan beberapa faktor yang menjadi kendala antara lain kendala ekonomi, kelalaian orang tua, rendahnya pendidikan orang tua, dan rendahnya semangat kerja orang tua.

Pemahaman masyarakat terhadap pemenuhan kewajiban orang tua, khususnya terkait perceraian masih minim, terbukti dengan terbatasnya pengetahuan terhadap hak anak dalam kaitannya dengan biaya hidup. Dalam memenuhi kewajiban orang tua pasca perceraian terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya yang tidak dapat dipungkiri, namun bukan berarti kewajiban orang tua menjadi batal. Kendala yang sering dihadapi orang tua adalah keterbatasan ekonomi. Namun hal ini bukan hanya disebabkan oleh keterbatasan ekonomi, namun juga karena ketidakpedulian orang tua, rendahnya tingkat pendidikan, dan rendahnya etika orang tua. Namun kewajiban tetap ada dan segalanya harus diberikan kepada anak agar bisa bertahan hidup. Oleh karena itu, diperlukan peran aparat penegak hukum untuk turut serta menjaga masa depan anak, seperti pengacara atau hakim pengadilan agama. Upaya harus selalu dilakukan untuk menjamin hak finansial anak untuk kelangsungan hidup dan pendidikannya. Beberapa faktor yang dapat berkontribusi terhadap hak-hak anak adalah orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Berikut ini beberapa gagasan-gagasan upaya khusus dalam hal perkara nafkah anak:

a. Harta Benda Milik Ayah dijamin Setelah Terjadinya Perceraian

Putusan hakim pada pokoknya menyatakan bahwa ayah wajib terus memberikan kepada anaknya sejumlah uang tertentu setiap bulannya sampai anak tersebut mencapai usia dewasa atau setidaknya sampai berumur 21 tahun. Hal ini menimbulkan adanya hubungan hukum kreditur-debitur antara ayah dan anaknya atau dapat dipahami dengan timbulnya hubungan antara pihak yang mempunyai kewajiban tertentu dengan pihak yang berhak menerima sesuatu dari sana. Tentunya dengan adanya undang-undang ini, ayah harus menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya.

Hukum perdata Indonesia telah mengatur pelaksanaan tugas seseorang dan penghormatan terhadap hak-hak Setiap orang dalam hubungan kreditur-debitur telah

⁴ Ahmad Kamil, H., Fauzan, Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hlm 12

memperkenalkan konsep hukum jaminan, diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata: “Segala barang bergerak dan tidak bergerak yang dimiliki oleh debitur adalah Hutang, baik yang sekarang maupun yang akan datang, merupakan jaminan atas kewajiban-kewajiban pribadi debitur”.

- b. Suatu upaya pembelaan hukum yang memberikan kesempatan kepada warga negara untuk menyampaikan keberatannya;
- c. Pemerintah menerapkan perlindungan hukum yang bertujuan untuk penyelesaian sengketa yang lebih besar. Perlindungan hukum kepada anak yang tidak diasuh oleh bapaknya setelah perceraian harus sesuai dengan asas pengakuan dan perlindungan harkat dan martabat manusia berdasarkan Pancasila dan asas 'Negara Hukum.

Setiap orang berhak dilindungi undang-undang, karena sebagian besar hubungan hukum pasti dilindungi undang-undang. Kebanyakan orang menghormati hak anaknya tidak sesuai dengan undang-undang, karena dibawa oleh orang tua mengeluarkan adat istiadat sebagai pedoman yang tidak berdasarkan undang-undang yang ada. Setelah itu, orang yang tinggal bersama anak tersebutlah yang akan mengasuhnya. Sedangkan hak-hak anak seringkali dijamin mencakup biaya hidup, uang sekolah dan biaya lainnya. Sulitnya orang tua menerima peraturan perundang-undangan dan pemerintah. Permasalahannya adalah faktor kebiasaan yang dijadikan pedoman oleh orang tua. Biasanya bentuk rutinitas masyarakat itulah yang dipedomani. Selain itu, banyak orang tua yang merasa bangga ketika mengetahui bahwa mereka tidak bisa mengurus anaknya.

Berbagai upaya dilakukan agar tidak dicap lalai. Selain faktor-faktor yang biasa terjadi, di Indonesia belum ada lembaga yang memantau pelaksanaan tunjangan anak setelah ada keputusan pengadilan. Jika tunjangan anak diabaikan, maka pihak yang dirugikan dapat meminta agar putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap atau dapat menuntut pihak yang melalaikan kewajiban tersebut. Pengadilan tidak dapat menjamin bahwa tunjangan anak akan dibayarkan secara teratur atau bahwa tunjangan anak akan diberikan sebesar nilai nominal yang ditentukan oleh pengadilan. Jika kelalaian dalam wawancara tidak digugat karena berbagai alasan, seperti dia sudah menyerah atau tidak mau lagi menghubungi pengadilan atau mantan pasangannya, maka dia mengabaikan tanggung jawabnya kepada saya. Tentu saja hal ini sangat merugikan kepentingan anak, oleh karena itu perlu dibentuk atau diidentifikasi secara

khusus suatu badan pengawas yang jelas agar pemerintah dapat memantau keteraturan pembayaran dan penyelesaian perkara di luar pengadilan sehubungan dengan hal tersebut tentang orang tua yang memberikan nafkah anak setelah perceraian hingga anak menjadi dewasa.

Perlindungan hukum bagi anak yang tidak dipenuhi nafkahnya oleh seorang ayah pasca perceraian dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Adapun cara yang dapat dilakukan dengan langsung menjadikan anak sebagai sasaran utama dalam proses perlindungan yang dimaksud, seperti melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung dapat melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi, dan menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang dapat mendukung tumbuh kembang anak. Adapun perlindungan anak secara tidak langsung ialah kegiatan atau upaya dalam melindungi anak melalui media lain yang tidak langsung bersentuhan dengan anak itu sendiri. Hal ini biasanya terkait dengan kebijakan jangka panjang, yaitu melalui kegiatan untuk mencegah kelaparan, mengusahakan sistem kesehatan yang modern, atau membuat sistem peradilan yang berpihak kepada anak. Berbagai upaya tersebut menjadi tanggung jawab bersama sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Hal tersebut penting dilakukan demi menjamin dan terwujudnya perlindungan terhadap hak-hak nafkah terhadap anak. Dalam proses perlindungan terhadap hak nafkah anak, kepastian hukum merupakan jaminan utama agar usaha-usaha itu tetap berlangsung. Serta kepastian hukum merupakan hal penting yang perlu diusahakan demi tetap berlangsungnya usaha-usaha perlindungan anak serta menjadi faktor utama yang dapat mencegah penyelewengan terhadap pelaksanaan perlindungan anak yang dimaksud.

Sesuai kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian dituangkan dalam keputusan pengadilan agama, ayah wajib mentuntaskan nafkah anak. Sanksi penting untuk diterapkan, karena hal tersebut jelas merupakan suatu hal hukuman yang mengikat atau tindakan memaksa terhadap yang bersangkutan sehingga menimbulkan efek jera. Sanksi Hukum yang ada di Indoneisa, yaitu :

1. Sanksi Pidana

- a. Hukuman dasar, seperti hukuman mati, penjara, penjara, dan denda.
- b. Pidana tambahan contohnya termasuk perampasan hak-hak tertentu, perampasan harta benda tertentu, dan pengumuman keputusan hakim..

2. Sanksi Perdata memuat tentang :
 - a. Tanggung jawab untuk bertindak sesuai perintah oleh hakim.
 - b. Gugurnya aturan yang telah diikat dan adanya aturan yang baru.
3. Sanksi Administratif; denda dan peringatan tertulis tentang pembatalan beberapa izin, dan hukuman terhadap ayah atas hak anak dari orang tua yang bercerai. Oleh karena itu, kecuali jika sang ayah benar-benar mempunyai ketidakmampuan ekonomi, maka harus dicari rumusan untuk menentukan sanksi hukum yang akan diberikan kepada ayah yang tidak memenuhi kewajibannya mengasuh anaknya. Menurut hukum Islam, hukuman hukum yang diberikan kepada pelaku kejahatan atau orang tua (ayah) laki-laki yang menjalankan tugas pengasuhannya termasuk dalam kategori ta'zir, dan beratnya hukuman ini diserahkan kepada hakim yang memustuskan. Sanksi yang digunakan antara lain pidana penjara, kurungan, denda, teguran lisan, skorsing atau pengusiran, dan sanksi lainnya atas apa yang dianggap sebagai pelanggaran. Berdasarkan definisi di atas, anak dapat menuntut hak untuk memenuhi kebutuhannya. Hukum Islam dan hukum yang baik mengatakan bahwa meskipun perkawinan antara kedua orang tua tidak lagi dilangsungkan, ayah tetap wajib menafkahi anak-anaknya; karena pada hakikatnya tidak ada yang namanya anak tua dan itu kena hukuman yang sah menurut syariat Islam. Hukum yang Baik memberikan sanksi hukum terhadap pelanggaran perdata dan pidana.

Kesimpulan

Berdasarkan temuan kajian mengenai perlindungan hukum kepada anak setelah bercerai menurut hukum Islam dan Positif: Implementasi undang-undang perlindungan nafkah dalam perceraian belum dilaksanakan padahal sudah ada peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan kewajiban baik dalam hukum positif dan hukum Islam. Upaya untuk menegakkan pembayaran tunjangan akibat perceraian terus dilakukan, meskipun ada hambatan yang menghadang, terutama melalui kasus penegakan tunjangan dan kasus penelantaran anak. Perlindungan anak dapat diartikan sebagai tindakan melindungi kebebasan dan hak asasi anak, serta berbagai kepentingan tentang kelangsungan hidup anak. Apabila suatu perkawinan tidak bertahan lama dan terjadi perceraian, maka anak mempunyai hak yang sah atas kasih sayang, pendidikan, dan tempat tinggal yang baik dari kedua orang tuanya. Dalam hukum Islam, sanksi hukum bagi ayah yang tidak menunaikan tanggung jawab mengasuh anaknya akibat perceraian

berbeda-beda, yaitu pendapat ulama Hā Nafi bahwa mengasuh anak merupakan kewajiban pertama ayah. Kalau dia miskin, artinya kalau dia mampu, maka ayahnya lah yang harus menggantikannya. Jika sang ayah sanggup namun menolak menafkahi anak tersebut, maka hakim diperintahkan untuk memaksa sang ayah untuk membayar, sedangkan mazhab Syafi'i, Hambali, dan Maliki berpendapat bahwa jika tidak, maka nafkah terhadap anak tersebut akan hilang. Itu adalah keputusan yang dibuat oleh hakim.

Daftar Pustaka

Buku :

Ahmad Kamil, H., Fauzan, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008
Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)
Ronald, *Seri Psikologi Anak : Peran Orang Tua Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup, Mendidik dan Mengembangkan Moral Anak*, (Bandung: CV. Yrama Widya, 2006)

Jurnal :

Amrunsyah, 2017. Tindak Pidana Perlindungan Anak: Perspektif Hukum Tentang Undang-Undang Perlindungan Anak, *Jurnal Al Qadha*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2017, IAIN Langsa.
Udin Safala, 2015, Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Abu Zahra Dan Implikasinya Bagi Pelaksanaan Hukum Islam Di Indonesia *Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, Vol 12, No 2, 2015

Peraturan Perundang-undangan :

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Internet :

Erizka Permatasari, Mengenai Sanksi Hukum Pidana, Perdata dan Administratif.
<https://www.hukumonline.com>.